

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan perkembangan ekonominya Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara industri. Industri kecil serta industri rumah tangga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor industri kecil dan industri rumah tangga sangat berperan sebagai sumber penghasilan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam menjalankan industri tersebut sering kali terdapat kendala salah satu yang paling utama yakni modal kerja. Maka kemudian guna untuk meningkatkan usaha di sektor industri kecil ini, masyarakat mengambil langkah alternatif peminjaman dana dengan kredit melalui koperasi.

Koperasi memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan yang berusaha untuk melayani kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya. Koperasi sendiri merupakan sebuah organisasi ekonomi yang anggotanya terdiri dari perseorangan maupun suatu badan yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk maupun keluar berdasarkan peraturan yang berlaku yang dalam menjalankan usahanya dilakukan secara kekeluargaan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan jasmani para anggotanya.¹ Pengertian koperasi berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yakni:

¹ Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, hal 9

“koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang paling sering dijadikan alternatif oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana guna meningkatkan usahanya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung mengenai perkreditan atau simpan pinjam.² Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 *“Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”*.

Koperasi simpan pinjam biasanya memberikan kredit kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pinjaman dana. Perjanjian kredit oleh koperasi diatur dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 02//PERM/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi:

“Kredit atau Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”.

Secara yuridis perjanjian kredit yang dilakukan antara koperasi dengan anggotanya merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam buku III KUH Perdata (*van verbittenissen*).³ Yang dimaksud dengan

² R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, hal. 65

³ I Gusti Agung Wisudawan, “Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi”, *Jurnal Jatiswara*, Volume 27 Nomor 1, (Oktober 2017), hal. 100

Perjanjian pinjam meminjam atau pinjam pakai habis berdasarkan pasal 1754

KUH Perdata yakni:

“suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

Perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang atau lebih yang saling berjanji melakukan sesuatu.⁴

Sedangkan pengertian kredit sendiri menurut pendapat Thomas Suyatno menyatakan bahwa kredit merupakan suatu hak untuk menerima maupun melakukan pembayaran diwaktu yang telah disepakati, pada waktu mendatang, sebab adanya penyerahan suatu barang pada waktu sekarang.⁵

Maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian dapat dikatakan sah jika terpenuhinya beberapa syarat yakni *“adanya suatu hal tertentu, sepakat para pihak, kecakapan, adanya suatu sebab yang halal”*.⁶

Melalui perjanjian kredit akan timbul suatu hubungan hukum antara koperasi sebagai kreditur dengan anggota koperasi atau masyarakat yang disebut sebagai debitur. Kreditur berhak atas pengembalian pinjaman uang tersebut kemudian sebaliknya seorang debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada kreditur pada tenggang waktu yang telah diperjanjikan dengan pembayaran sejumlah bunga. Tenggang waktu merupakan suatu masa dimana memisahkan antara pemberian prestasi

⁴ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 1

⁵ Suyatno, Thomas, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 12

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafit, hal. 230

dengan kontra prestasi yang kemudian akan diterimanya dimasa mendatang.⁷ Untuk perjanjian pinjam meminjam dengan bunga telah diatur dalam Pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi “*untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas peminjaman itu akan dibayar bunga.*”

Mengenai lamanya jangka waktu dalam perjanjian kredit, seorang debitur diberi kebebasan dalam memilih berapa lama ia sanggup melunasi pinjamannya, hal tersebut disesuaikan dengan kemampuannya. Maka suatu koperasi harus melakukan penilaian kepada calon debitur sebelum memberikan pinjaman kredit yang dikenal dengan prinsip 5C yakni Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*) dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*).⁸

Maka untuk mendapatkan suatu pinjaman kredit maka pihak koperasi sebagai kreditur akan memberikan beberapa persyaratan kepada debitur yang harus dipenuhi, salah satunya yakni jaminan. Seringkali pinjaman uang dijamin dengan suatu beban atas atau kepentingan pada barang milik debitur, oleh karena itu, jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, kreditur dapat menerima barang tersebut dan memulihkan piutangnya dari hasil penjualan barang milik debitur itu.⁹ Tujuan diadakannya suatu syarat jaminan tidak lain untuk melindungi kepentingan pihak kreditur serta mengurangi resiko timbulnya kredit macet sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian bagi

⁷ I Gusti Agung Wisudawan, *Op. Cit*, hal. 101

⁸ I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yulianti Griadhi, “Penerapan Prinsip 5C sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 8, (Juli 2019), hal. 3

⁹ Abdulkadir Muhammad SH, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Alumni, hal. 297

pihak koperasi. Dengan adanya jaminan pula diharapkan pihak debitur dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati.

Barang-barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada umumnya benda tidak bergerak yang paling sering digunakan sebagai jaminan oleh masyarakat adalah sertifikat tanah dan bangunan. Sedangkan untuk benda bergerak salah satunya adalah kendaraan bermotor. Maka debitur dapat menjadikan surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan guna mendapatkan pinjaman kredit dari koperasi. Surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor merupakan sebuah bukti yang sah bahwa kendaraan bermotor tersebut merupakan milik pribadi orang yang bersangkutan serta dapat diartikan sebagai sertifikat kepemilikan. Jaminan atas surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diikat sebagai Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maka Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor yang dijadikan sebagai objek jaminan merupakan tanda kepemilikan yang dialihkan, sedangkan kendaraan bermotor masih akan tetap dalam kekuasaan debitur.¹⁰

Al-Quran telah mengatur secara tegas mengenai anjuran menggunakan Jaminan tepatnya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

¹⁰ Letezia Tobing S.H., M.Kn, Selasa, 10 Juni 2014, *Jika Objek Jaminan Fidusia Dijual kepada Orang Lain*, dalam www.hukumonline.com diakses Sabtu, 13 Maret 2021 pukul 00.25

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 283)

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 283 di atas menerangkan, jika suatu transaksi berlangsung dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, serta tidak menemukan seorang penulis untuk mencatat transaksi tersebut dengan sebagaimana mestinya maka diharuskan ada suatu barang tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman.¹¹ Penjelasan mengenai tidak adanya penulis serta dalam keadaan berpergian memberikan arti bahwa diperbolehkannya *udzur* atau *rukhsan* yang mana memperbolehkan suatu perjanjian tidak ditulis atau dicatat namun sebagai gantinya dijadikanlah jaminan sebagai bentuk kepercayaan dari seorang debitur kepada kreditur.¹²

¹¹ Shofiyun Nahidloh, “Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam”, *Et-Tijarie*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2014), hal. 4

¹² Shofiyun Nahidloh, *Ibid*, hal.14

Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi merupakan salah satu contoh koperasi simpan pinjam yang menjadikan jaminan sebagai syarat paling utama untuk mendapatkan pinjaman dana. Salah satu benda yang sering dijaminkan oleh debitur kepada Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi yakni surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Meskipun surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut dijaminkan, seorang debitur masih tetap dapat menggunakan kendaraan bermotornya seperti biasanya. Benda jaminan tersebut dapat di eksekusi apabila terjadi kredit macet serta dapat dikembalikan lagi ketika seorang debitur telah melunasi hutangnya di waktu yang telah disepakati bersama dengan Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi.

Maka kemudian penulis melalui penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian kredit dalam koperasi simpan pinjam dengan menggunakan jaminan surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menjadikan permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“Kredit Dan Jaminan : Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Studi di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi”**

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian diperlukan agar penulis dapat fokus dan penelitian dapat dikhususkan dengan membahas satu obyek

permasalahan saja. Selain itu dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam pengumpulan data. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperoleh suatu pembahasan dan informasi yang jelas. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya untuk meneliti tentang Kredit dan Jaminan : Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi?
2. Bagaimana hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan yakni :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi .

- b. Untuk mengetahui hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemikiran bagi penulis di bidang Hukum Perdata, terutama pada masalah perjanjian serta jaminan
- b. Untuk meningkatkan kemampuan analisis penulis sebagai seorang mahasiswa guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

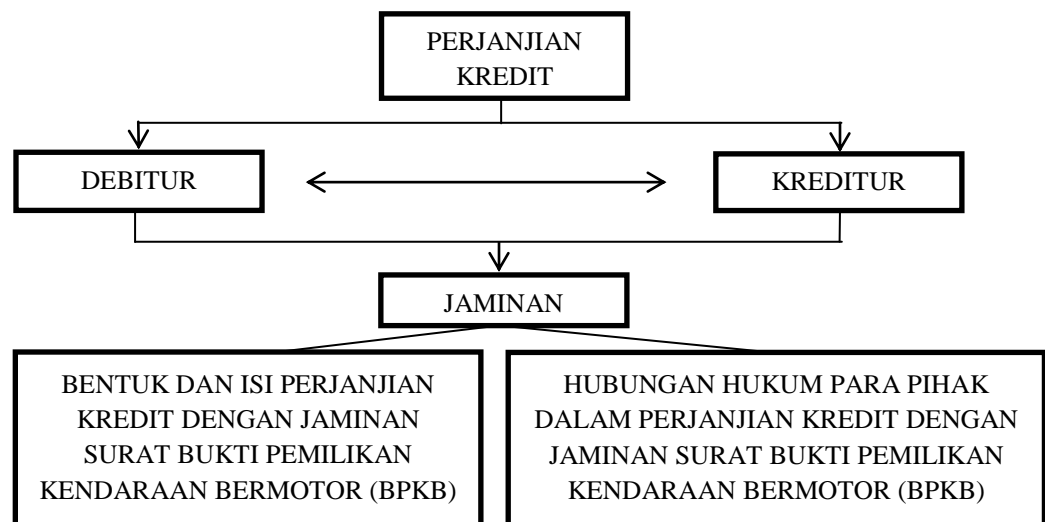
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata di indonesia khususnya tentang perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam SAE Ngawi dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (Sarjana) jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh pembaca saat menghadapi masalah terakait dengan perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan kepada pembaca yang tertarik mengenai perjanjian kredit yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih lanjut.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Untuk segala bentuk persyaratan dalam mendapatkan suatu pinjaman dana di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi yang mana telah disepakati dengan pihak debitur maka akan dituangkan kedalam suatu perjanjian kredit. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Menekankan pada kata semua dalam pasal tersebut, maka mengandung pernyataan jika kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian

yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian tersebut akan mengikat siapa saja yang membuatnya seperti undang-undang.¹³

Perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi “*suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama*”. Melalui Perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam ini akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, dimana seorang kreditur berhak atas pengembalian pinjaman uang serta seorang debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut pada tenggang waktu yang telah diperjanjikan dengan pembayaran sejumlah bunga. Mengenai ketentuan diperbolehkannya suatu perjanjian pinjam meminjam dengan bunga telah diatur sebagaimana termuat dalam Pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi “*untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas peminjaman itu akan dibayar bunga.*”

Kemudian suatu koperasi simpan pinjam harus melakukan penilaian kepada calon debitur sebelum memberikan pinjaman kredit yang dikenal dengan prinsip 5C yakni Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*) dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*).¹⁴

¹³ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 14

¹⁴ I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yulianti Griadhi, *Op Cit*, hal. 3

Maka kemudian untuk mendapatkan pinjaman melalui Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi seorang debitur haruslah memenuhi beberapa syarat salah satunya yakni jaminan. Barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah barang yang bernilai tinggi atau berharga. Lalu semua barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan kreditur, dasar hukumnya Pasal 1131 KUH Perdata.¹⁵ Maka ketika seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada kreditur, benda yang dijaminakan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, serta hasil dari penjualan akan dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1132 KUH Perdata).¹⁶

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan salah satu contoh barang yang dapat dijadikan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi. Surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor merupakan sebuah bukti yang sah bahwa kendaraan bermotor tersebut merupakan milik pribadi orang yang bersangkutan serta dapat diartikan sebagai sertifikat kepemilikan. Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dapat dibebankan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berdasarkan pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Fidusia yaitu *“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”*.

¹⁵ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, hal. 8

¹⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.75

Maka kemudian isi dan bentuk suatu perjanjian kredit haruslah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang nantinya dijadikan dasar dalam penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi disempurnakan dengan PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan gagasan hukum tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan melakukan analisis.¹⁷ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang merupakan bahan dasar yang kemudian diadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang

¹⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

dianggap berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸

Penelitian ini nantinya akan meneliti mengenai aspek hukum, asas hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Sae Ngawi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian prosedural dengan melakukan pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendiskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat.¹⁹ Penelitian deskriptif bertujuan mendiskripsikan secara tepat karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain di masyarakat.²⁰ Maka dengan jenis penelitian ini kemudian akan dapat menggambarkan dengan jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor di Koperasi Sae Ngawi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi tepatnya beralamat di Jl. Nasional 15, Pasar Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

4. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 13-14

¹⁹ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

²⁰ Amaruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis serta peraturan perundang-undangan.²¹ Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
4. PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi disempurnakan dengan PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
5. Bahan-bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, makalah, media masa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

²¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 22

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan tersier, misalnya kamus hukum maupun ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sistem pengumpulan data dengan mencari informasi langsung melalui responden. Wawancara dilakukan dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode normatif kualitatif yang memperoleh data dengan melakukan obsevarsi, wawancara yang kemudian hasil dari penelitian tersebut dipelajari dan dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya.

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Pemikirn

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Macam-Macam Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Unsur-Unsur Perjanjian
5. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melawan Hukum
6. Asas-Asas Hukum Perjanjian
7. Akibat Hukum Perjanjian
8. Berakhirnya Perjanjian

B. Tinjauan Umum tentang Kredit atau Pinjam Meminjam Uang dan Jaminan

1. Pengertian Kredit atau Pinjam Meminjam Uang
2. Unsur-Unsur Kredit atau Pinjam Meminjam Uang
3. Prinsip Pemberian Kredit
4. Tujuan dan Fungsi Kredit atau Pinjam Meminjam Uang
5. Pengertian Jaminan
6. Jenis-Jenis Jaminan
7. Jaminan Fidusia

C. Tinjauan Umum tentang Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi

2. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi
- B. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA